

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Ruang adalah wadah pada lapisan atas permukaan bumi termasuk apa yang ada di atasnya dan yang ada di bawahnya sepanjang manusia masih menjangkaunya. Dengan demikian, ruang adalah lapisan atas permukaan bumi yang berfungsi menopang kehidupan manusia dan makhluk lainnya, baik melalui memodifikasi atau sekedar langsung menikmatinya. Setiap orang membutuhkan ruang agar dapat melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya, contohnya digunakan untuk bertempat tinggal. Ruang yang tetap, tetapi kebutuhan akan ruang semakin bertambah, menjadi salah satu masalah yang terjadi saat ini. Kebutuhan akan ruang yang semakin meningkat dapat disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya adalah penambahan jumlah penduduk yang meningkat<sup>1</sup>.

Pertambahan jumlah penduduk yang semakin pesat tersebut menyebabkan banyak orang yang kemudian mencari lahan-lahan yang diperlukan untuk mendirikan bangunan-bangunan ataupun rumah untuk menjadi tempat tinggal mereka. Pertambahan jumlah penduduk yang berada di wilayah perkotaan yang sudah padat akan rumah-rumah akan menjadi kendala bagian sebagian orang untuk mencari lahan, karena keterbatasan lahan-lahan tersebut banyak orang yang kemudian mendirikan rumah-rumah di kawasan yang seharusnya tidak diperbolehkan untuk mendirikan bangunan atau rumah. Kawasan yang seharusnya tidak diperbolehkan untuk didirikan rumah-rumah tersebut

---

<sup>1</sup>Robinson Tarigan, 2005, *Perencanaan Pembangunan Wilayah (Edisi Revisi)* , Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 49.

dikarenakan tidak mendapatkan tindak lanjut oleh pemerintah mengakibatkan terbentuknya sebuah permukiman di kawasan tersebut. Keberadaan permukiman di kawasan yang tidak sesuai akan menyebabkan ketidaksesuaian dalam peraturan mengenai perencanaan tata ruang wilayah.

Perencanaan tata ruang wilayah adalah proses yang melibatkan banyak pihak dengan tujuan agar penggunaan ruang itu memberikan kemakmuran yang sebesar-besarnya kepada masyarakat dan terjaminnya kehidupan yang berkesinambungan. Setiap rencana tata ruang harus memperhatikan tujuan pemanfaatan ruang, struktur dan pola pemanfaatan ruang, dan pola pengendalian pemanfaatan ruangnya sehingga perlu diperhatikan bahwa perencanaan tata ruang wilayah itu selain memberikan kemakmuran dan terjaminnya kehidupan masyarakat harus tetap memperhatikan kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah<sup>2</sup>.

Di Kota Yogyakarta masih banyak pemanfaatan ruang yang belum sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta. Hal itu dapat dilihat dari banyaknya permukiman yang berdiri secara liar di Kota Yogyakarta. Selain faktor kepadatan penduduk yang terjadi di Kota Yogyakarta, faktor lainnya adalah masalah kemiskinan. Kemiskinan yang terjadi pada sebagian masyarakat membuat masyarakatnya tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara layak, sehingga membuat mereka mendirikan rumah di kawasan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Selain itu faktor lainnya adalah ketidaktahuan masyarakat mengenai lahan yang di manfaatkan oleh mereka untuk mendirikan rumah di kawasan tersebut ternyata tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Di Kota Yogyakarta memiliki beberapa sungai-sungai, salah satunya adalah sungai Gajah Wong. Di sungai Gajah Wong sendiri terdapat banyak permukiman yang berdiri di garis sempadan sungai. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai

---

<sup>2</sup>Robinson Tarigan, 2005, *Perencanaan Pembangunan Wilayah (Edisi Revisi)* , Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 58.

memberikan definisi mengenai pengertian Sungai yaitu alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan. Garis sempadan sungai adalah garis batas luar pengamanan yang memiliki kawasan di kanan kiri sungai yang mempunyai manfaat penying untuk mempertahankan kelestaria sungai<sup>3</sup>. Sungai merupakan suatu kawasan yang harus dijaga kelestariannya sehingga tetap terjaga ekosistem sungainya dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat tanpa merusak kelestarian sungai.

Dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 Tentang RTRW Kota Yogyakarta Pasal 100, memuat peraturan zonasi kawasan lindung berupa kawasan sungai yang memiliki ketentuan menertibkan penggunaan lahan sempadan sungai dengan tidak memperbolehkan mendirikan bangunan permukiman yang mengganggu kelestarian kawasan sempadan sungai. Keberadaan permukiman yang berada di garis sempadan sungai Gajah Wong tersebut menyebabkan kawasan tersebut sangat tidak tertata dan mengganggu kelestarian kawasan sungai.

Didalam <sup>4</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Pasal 1 Angka 3 telah memberikan definisi mengenai kawasan permukiman yaitu Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa Kawasan Perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau Lingkungan Hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Keberadaan permukiman di kawasan sempadan sungai selain membuat terganggunya kelestarian sungai juga membuat ketidaksesuaian dalam pengaturan mengenai pemanfaatan ruangnya, hal tersebut

---

<sup>3</sup>Dra. Taryati, dkk. 2011, *Pemahaman Masyarakat Terhadap Daerah Rawan Ekologi*, Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional, Yogyakarta, hlm 49.

<sup>4</sup>PP Nomor 14 Tahun 2016

dikarenakan sempadan sungai termasuk dalam salah satu kawasan lindung yang seharusnya tidak diperuntukkan untuk hal-hal yang dapat merusak ekosistem sungai seperti halnya keberadaan permukiman di kawasan garis sempadan sungai Gajah Wong tersebut.

Keberadaan permukiman di garis sempadan Sungai gajah Wong seharusnya memperhatikan kesesuaiannya terhadap rencana tata ruang wilayah Kota Yogyakarta agar pelaksanaan peraturan mengenai rencana tata ruang wilayah Kota Yogyakarta dapat sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tergerak untuk melakukan penelitian mengenai keberadaan permukiman di garis sempadan Gajah Wong berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalahnya sebagai berikut.

1. Apakah keberadaan permukiman di garis sempadan Sungai Gajah Wong telah sesuai berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta?
2. Bagaimana tindak lanjut Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta terhadap keberadaan permukiman di garis sempadan sungai Gajah Wong tersebut ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang terkait dengan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui apakah keberadaan permukiman di garis sempadan Sungai Gajah Wong telah sesuai berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta tersebut.
2. Untuk mengetahui bagaimana tindak lanjut dari Pemerintah Faerah Kota Yogyakarta terhadap keberadaan permukiman di garis sempadan Sungai Gajah Wong.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan agar dapat pengembangan ilmu hukum di bidang hukum pertanahan dan lingkungan hidup dan penataan ruang.

2. Manfaat Praktis :

- a. Bagi Peneliti Lain

Dengan adanya penelitian ini akan memberikan manfaat bagi peneliti lain yang akan meneliti permasalahan yang berkaitan mengenai permukiman di garis sempadan sungai agar mendapat informasi dan motivasi bagi penelitiannya.

- b. Bagi Masyarakat yang tinggal di kawasan garis semadan sungai Gajah Wong

Dengan adanya penelitian ini akan membantu meningkatkan kesadaran masyarakat yang tinggal di kawasan garis sempadan sungai Gajah Wong untuk lebih mengetahui bahwa mendirikan rumah di garis sempadan Sungai Gajah Wong adalah menyalahi aturan yang ada

c. Bagi Pemerintah Daerah

Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta agar mengetahui permasalahan yang terjadi dan segera menindaklanjuti keberadaan permukiman di garis sempadan Sungai Gajah Wong tersebut.

**E. Keaslian Penelitian**

Dalam suatu penelitian akan ada beberapa peneliti lain yang meneliti suatu permasalahan yang sama, oleh karena itu peneliti membutuhkan hasil-hasil dari penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian tersebut, sehingga penelitian yang dilakukan peneliti memiliki kebaruan atau berbeda. Penelitian dengan judul “Keberadaan Permukiman Di Garis Sempadan Sungai Gajah Wong Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta” merupakan karya dari peneliti bukan merupakan plagiasi terhadap penelitian lain. Berikut adalah beberapa penelitian dengan tema yang senada :

1. Identitas Penulis :

- a. Nama : Muhammad Singgih Prakoso
- NPM : 12340091
- Instansi : Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

b. Judul :“PENDIRIAN PERMUKIMAN DI GARIS SEMPADAN SUNGAI GAJAH WONG”.

c. Rumusan Masalah :

1) Bagaimana penegakan sanksi terhadap permukiman yang berada di garis sempadan Sungai Gajah Wong?

2) Apa kendala penegakan sanksi terhadap permukiman yang berada di sempadan Sungai Gajah Wong.

d. Hasil Penelitian :

Penegakan sanksi didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman dan peraturan pemerintah yang mengaturnya belum bisa menertibkan permukiman di sepanjang sungai Gajah Wong kampung Balirejo karena jika dilakukan pembongkaran maka permukiman yang berada di sempadan sungai lainnya harus di bongkar. Peraturan dan penegakan sanksi yang ada belum di laksanakan dengan baik dan masih kurangnya peran pemerintah terkait permukiman di garis sempadan Sungai Gajah Wong tersebut.

Kendala yang dihadapi dalam penegakan sanksi terhadap adanya permukiman di garis sempadan Sungai Gajah Wong adalah masih kurangnya pengawasan dan sosialisasi oleh pemerintah Kota Yogyakarta terhadap permukiman yang berada di garis sempadan Sungai Gajah Wong tersebut. Selain itu kurangnya kesadaran dari masyarakat Kampung Balirejo sendiri terkait pendirian permukiman yang mereka dirikan berada di sempadan Sungai Gajah Wong adalah menyalahi aturan yang ada.

## 2. Identitas Penulis

a. Nama : Yusra Hidayat Rasyid

NPM : E121 13 507

Instansi : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hassanuddin Makasar

b. Judul :“ IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN RUANG WILAYAH SEMPADAN SUNGAI JENEBERANG DI KECAMATAN SOMBA OPU KABUPATEN GOWA”

c. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 khususnya kawasan sempadan Sungai Jeneberang di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa?
- 2) Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi implementasi kebijakan penataan ruang di kawasan sempadan sungai Jeneberang di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa?

d. Hasil Penelitian :

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di rumuskan oleh peneliti di atas, hasil peneltian yang di peroleh peneliti adalah sebagai berikut. Impelentasi kebijakan penataan ruang khususnya kawasan sempadan sungai di Kabupaten Gowa belum terlaksana dengan baik, dikarenakan bahwa pemanfaatan ruang di sempadan sungai Jeneberang.

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penataan ruang di kawasan sempadan sungai Jeneberang di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa yaitu di kawasan sempadan sungai jeneberang tidak sesuai dengan peruntukan pemanfaatan ruang di sempadan sungai jeneberang. Dalam hal pengawasan pemerintah kurang mengawasi pemanfaatan ruang di kawasan sempadan sungai yang sesuai dengan peruntukan pemanfaatan ruang yang di jelaskan pada peraturan daerah Nomor 15 tahun 2012 pada pasal 79 tentang ketentuan umum peraturan zonasi sempadan sungai. kedua pemerintah tidak tegas terhadap sebagian masyarakat yang memanfaatkan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukan pemanfaatan ruang. Ketiga kurangnya



kordinasi antara pihak dan dinas yang terkait dalam penyelenggaraan penataan ruang di kabupaten gowa.

### 3. Identitas Penulis

- a. Nama :Charoline Koni Padaka  
NPM :140511532  
Instansi :Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- b. Judul :“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KAWASAN SEMPADAN PANTAI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL”
- c. Rumusan Masalah :
- 1) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap kawasan sempadan pantai Kabupaten Gunungkidul berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul ?
  - 2) Upaya apa yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap kawasan sempadan pantai?
- d. Hasil Penelitian :

Perlindungan terhadap kawasan sempadan pantai berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul belum dapat terwujud sepenuhnya berdasarkan hasil penelitian, terdapat kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan arahan fungsi kawasan. Selain itu upaya Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap kawasan sempadan pantai yaitu mensosialisasikan Peraturan

daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tta Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul kepada masyarakat.

Penelitian yang peneliti lakukan berbeda dengan penelitian yang di lakukan oleh Muhammad Singgih Prakoso, Yusra Hidayat Rasyid dan Charoline Koni Padaka. Perbedaannya terletak pada Lokasi penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu Muhmmad Singgih Prakoso melakukan penelitian di Kampung Balirejo, kemudian Yusra Hidayat Raysid melakukan penelitian di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa sedangkan peneliti akan melaukan penelitian di Kampung Gambiran. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh peneliti juga berbeda dengan Charoline Koni Padaka, perbedaannya terletak pada objek yang diteliti, penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sempadan sungai sedangkan dan Charoline Koni Padaka melakukan penelitian terhadap sempadan pantai

#### **F. Batasan Konsep**

1. Berdasarkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai, Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan (Pasal 1 Angka 1).
2. Berdasarkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai, yang dimaksud dengan Garis Sempadan Sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai (Pasal 1 Angka 9).

3. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan ( Pasal 1 Angka 3).
4. Berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007, yang dimaksud dengan Rencana Tata Ruang Wilayah adalah hasil perencanaan tata ruang (Pasal 1 Angka 16).

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian hukum empiris yaitu <sup>5</sup>penelitian yang dilakukan berfokus pada fakta sosial atau pendekatan *socio-legal*. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder.

### **2. Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Data Primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang obyek yang diteliti.
- b. Data Sekunder

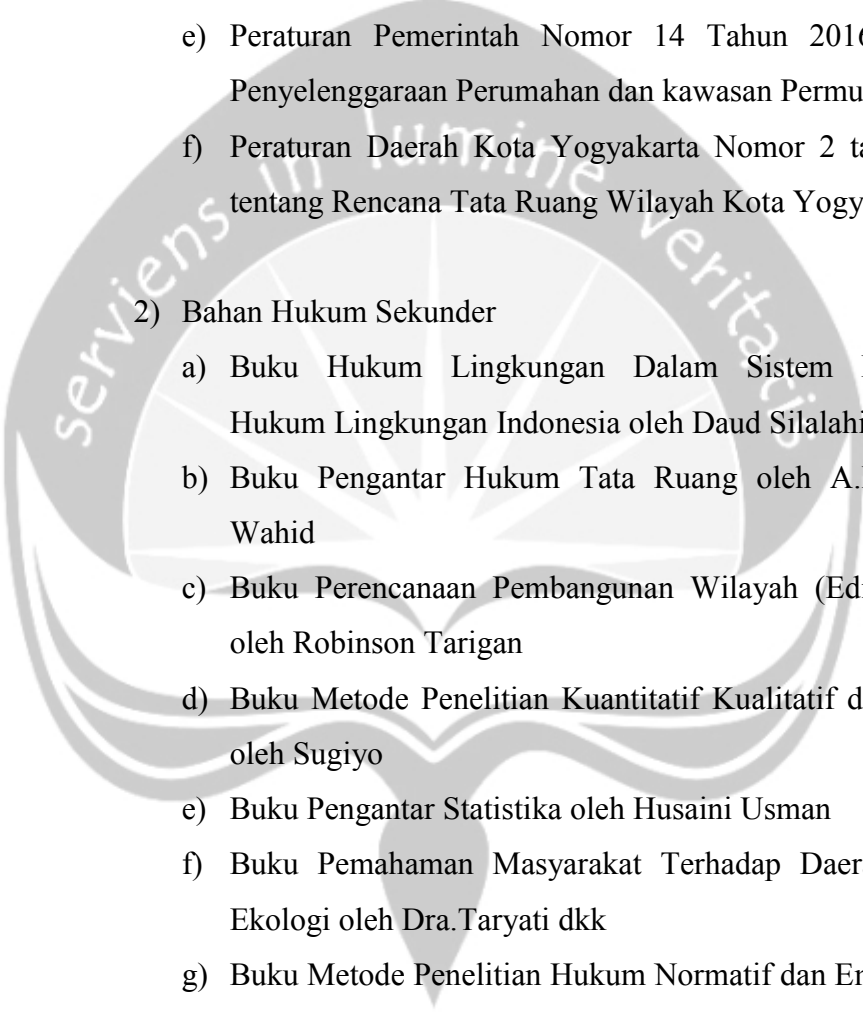
Data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu :

#### **1) Bahan Hukum Primer :**

- a) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

---

<sup>5</sup>Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok. Hlm. 153

- 
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
  - c) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah
  - d) Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2011 Tentang Sungai
  - e) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan kawasan Permukiman
  - f) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta
- 2) Bahan Hukum Sekunder
- a) Buku Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia oleh Daud Silalahi
  - b) Buku Pengantar Hukum Tata Ruang oleh A.M. Yunus Wahid
  - c) Buku Perencanaan Pembangunan Wilayah (Edisi Revisi) oleh Robinson Tarigan
  - d) Buku Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D oleh Sugiyono
  - e) Buku Pengantar Statistika oleh Husaini Usman
  - f) Buku Pemahaman Masyarakat Terhadap Daerah Rawan Ekologi oleh Dra.Taryati dkk
  - g) Buku Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris oleh Jonaedi Efendi
  - h) Buku Pengelolaan Daerah Sungai (DAS) Terintegrasi oleh Ussy Andawayanti
  - i) Jurnal wacana hukum berjudul Model Penatagunaan Tanah di Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 Vol-VIII/No-02/Oktober/2009 oleh Totok Dwinur Haryanto

- j) Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi berjudul Implementasi Kebijakan Penataan Ruang di Kota Bandung, Vol-VI/N0-02/Desember/2016 oleh Poni Sukaesih Kurniati.
- k) Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota berjudul Peranan Keseimbangan Sumber Daya Air terhadap Pemanfaatan Ruang Berdasarkan Keseimbangan Tata Air di Wilayah sub DAS Gajah Wong, Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota

### 3. Cara Pengumpulan Data

a. Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan :

- 1) Wawancara, yaitu Pengumpulan data yang akan dilakukan dengan cara wawancara terhadap narasumber.
- 2) Kuesioner, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan kuesioner kepada responden.

b. Untuk memperoleh data sekunder dengan melakukan studi kepustakaan.

### 4. Lokasi Penelitian

Penelitian akan di lakukan di kawasan permukiman yang berada di garis sempadan sungai Gajah wong yaitu Kampung Gambiran yang terletak di Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta.

### 5. Populasi

Menurut Sugiyono populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya<sup>6</sup> yang akan diteliti terkait orang-orang

---

<sup>6</sup>Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung, hlm. 80.

yang bertempat tinggal di garis sempadan Sungai Gajah Wong di Kampung Gambiran.

#### 6. Sampel

Sampel adalah sebagian anggotapopulasi yang diambil dengan menggunakan teknik tertentu yang disebut dengan teknik sampling<sup>7</sup>. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu responden yang tinggal selama lebih dari 10 tahun dari total jumlah orang-orang yang tinggal di garis sempadan sungai Gajah Wong.

#### 7. Responden

Responden adalah subyek yang sudah ditentukan berdasarkan sampel yang representative. Responden dalam penelitian ini adalah yang tinggal selama lebih dari 10 tahun di garis sempadan sungai gajah wong yaitu sebanyak 15 orang dengan memberikan kuesioner kepada responden.

#### 8. Narasumber

Narasumber yang akan membantu dalam penelitian, yaitu :

- a. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta yaitu Bapak Sigit Setiawan selaku Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- b. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta yaitu Bapak Pamungkas selaku Kepala Seksi Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci.

---

<sup>7</sup>Husaini Usman, 2009, *Pengantar Statistika*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 182.

## 9. Analisis Data

Analisis data dengan menggunakan data primer yang berupa data kualitatif berupa pendapat, keterangan atau penjelasan dari responden dan data lain yang tidak dapat di kuantitatifkan dan kemudian data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dideskripsikan atau dipaparkan dengan menggunakan kalimat yang menjelaskan data tersebut. Data primer maupun data sekunder yang kemudian dianalisis dengan metode kualitatif. Berdasarkan analisis data tersebut kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dengan metode penalaran induktif.

## H. Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan skripsi merupakan rencana isi penulisan skripsi yaitu :

### BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

### BAB II : PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tinjauan tentang Penataan Ruang, Penatagunaan Tanah, Permukiman, Sempadan Sungai dan hasil penelitian berupa monografi Kota Yogyakarta, Kecamatan Umbulharjo dan Kelurahan Pandenyan, Data Responden, hasil penelitian berkaitan dengan kesesuaian keberadaan permukiman di garis sempadan sungai gajah wong berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang RTRW Kota Yogyakarta, dan tindak lanjut pemerintah Kota Yogyakarta terkait permukiman di garis sempadan sungai gajah wong.

### BAB III : PENUTUP

Dalam bab ini berisi dua hal yaitu Kesimpulan dan Saran.

